

DAMPAK PEMBANGUNAN PESISIR PANTAI TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN ABELI KOTA KENDARI

Samsu

Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Kendari

samsu.mpd@gmail.com

Abstract

This paper focuses on the impact of coastal development on the socioeconomic conditions of fishing communities in Abeli district, Kendari of Southeast Sulawesi. This study resulted the finding that the coastal development activities have an impact on changes in socio-economic conditions of fishing communities which include: Coastal development leads to increasing income of fishing communities of Punggawa-Sawi generally above the high category. This has implications on the socio-economic changes of fishing communities towards a better, improved housing conditions, improving the conditions of public health, environmental hygiene, the network system of production and distribution of seafood, there are opportunities for fishing product, as well as the modernization of the system of fishing.

Key Words: Fishing Community, environment, production and distribution, system of fishing.

Abstrak

Tulisan ini difokuskan pada bagaimana dampak pembangunan pesisir pantai terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan di Kecamatan Abeli Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa kegiatan pembangunan pesisir pantai berdampak pada perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan yang meliputi: Pembangunan pesisir pantai mendorong terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat nelayan Punggawa-Sawi yang pada umumnya berada di atas kategori tinggi. Kondisi ini berimplikasi pada terjadinya perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan ke arah yang lebih baik, perbaikan kondisi perumahan, semakin membaiknya kondisi kesehatan masyarakat, kebersihan lingkungan, sistem jaringan produksi dan distribusi hasil laut, terbuka peluang usaha perikanan, serta terjadinya modernisasi pada sistem penangkapan ikan. Hambatan nelayan dalam memperbaiki taraf ekonominya

adalah tingkat pendidikan dan pelatihan yang rendah, kurangnya alat produksi, sistem bagi hasil, serta faktor pemasaran dan harga ikan. Faktor pemasaran di lokasi ini relatif dapat teratasi dengan baiknya jalur transportasi, banyaknya usaha pengeringan ikan, dan dimanfaatkannya ikan kecil sebagai pakan udang.

Kata Kunci: Dampak pembangunan, Pesisir Pantai, produksi dan distribusi, sistem perikanan

Pendahuluan

Secara etis-normatif cita-cita yang ingin dicapai oleh negara Republik Indonesia adalah mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam upaya mencapai cita-cita tersebut diperlukan pembangunan yang merata dan berkesinambungan. Pada dasarnya, pembangunan adalah proses inovasi yang terus menerus dan berkesinambungan sebagai titik sentral menuju tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Proses pembangunan yang sedang digalakkan sifatnya dinamis yang seyogyanya mengaktifkan masyarakat.

Dalam GBHN, arah dan kebijakan pembangunan nasional secara jelas merumuskan bahwa tujuan akhir dari serangkaian proses pembangunan yang dilakukan adalah untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin, adil dan merata, termasuk terpenuhinya rasa aman, tenteram dan terciptanya kebebasan mengeluarkan pendapat. Oleh karena itu, dalam pembangunan yang berkeadilan setiap masyarakat berhak memperoleh kesempatan berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan serta prestasi setiap individu secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Untuk itu, pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan diarahkan secara langsung pada pemberdayaan dan peningkatan produktifitas masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan infrastruktur pemenuhan kebutuhan dasar “basic need” berupa papan, sandang, dan pangan. Untuk kearah ini perlu disiapkan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk melakukan aktifitas sosial ekonomi guna meningkatkan income perkapita mereka.

Abeli Kota Kendari merupakan sebuah wilayah yang mayoritas penduduknya berprofesi nelayan. Oleh karena itu, dalam rangka mengangkat dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakatnya, pemerintah kota Kendari membuat kebijakan pembangunan pesisir pantai secara permanen dengan segala infrastrukturnya untuk menunjang kehidupan para nelayan.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas maka pembangunan komunitas nelayan diharapkan mampu memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya, utamanya nelayan.

Paradigma Pembangunan

Dalam berbagai literatur dikenal berbagai paradigma pembangunan, mulai dari paradigma pembangunan yang bersifat klasik sampai kepada paradigma pembangunan yang bersifat modern. Namun dalam tulisan ini ada 3 paradigma pembangunan yang akan dideskripsikan, yaitu; paradigma pertumbuhan, paradigma pemerataan dan pemenuhan kebutuhan pokok dan paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia.

1. Paradigma Pertumbuhan.

Sebagai bangsa yang sedang membangun, Indonesia banyak memakai paradigma pertumbuhan ini, karena didominasi oleh pemikiran pentingnya pertumbuhan ekonomi dalam mengejar ketertinggalan (Ginanjar, 1996: 50). Paradigma pembangunan ini pada esensinya adalah suatu konsep pembangunan yang banyak bertumpu pada upaya penciptaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai suatu indikator utama keberhasilan pembangunan tanpa melihat apakah hasil pembangunan yang telah dicapai dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan atau hanya golongan tertentu saja.

2. Paradigma Pembangunan Pemerataan dan Pemenuhan Kebutuhan Pokok

Menurut Adelman sebagaimana yang dikutip oleh Ginanjar, 1996: 50) bahwa, melihat kegagalan yang ditimbulkan oleh “growth paradigma” maka muncullah gagasan bahwa pertumbuhan haruslah beriringan dengan pemerataan, kesempatan dan pembagian hasil-hasil pembangunan. Hanya dengan demikian mereka yang miskin, tertinggal dan tidak produktif akan menjadi produktif. Strategi yang demikian dikenal dengan “redistribution with growth”.¹

Paradigma tersebut sesungguhnya adalah suatu strategi pembangunan yang senantiasa berorientasi pada pemerataan dan pemenuhan kebutuhan pokok, mengutamakan indikator sosial, misalnya ; pendidikan, kesehatan, perumahan dan pelayanan sosial, lingkungan dan lembaga masyarakat.

¹Ginanjar Kartasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : Cides.th 1996, h. 50.

Dari teori tersebut di atas, dapat dikemukakan variabel yang menjadi rujukan dalam mengukur tingkat pemerataan dan kebutuhan pokok dalam pembangunan, yaitu :

- a. Variabel ketenagakerjaan dengan indikatornya, luas lapangan kerja, kesempatan kerja, tingkat pengangguran yang terjadi di dalam masyarakat.
- b. Variabel kemiskinan indikatornya, aset dan akses produktif, tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan dan gizi, perumahan, air bersih, peningkatan standar hidup, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengambilan keputusan.

Dampak Pembangunan

Menurut Handoyo, sebagaimana yang dikutip oleh Muurtola bahwa bila kita berbicara tentang dampak, maka tidak terlepas dari dampak yang bersifat primer dan bersifat sekunder. Dampak yang bersifat primer adalah perubahan lingkungan yang disebabkan secara langsung oleh suatu kegiatan pembangunan sedangkan dampak sekunder adalah sesuatu perubahan lingkungan yang secara tidak langsung dari suatu kegiatan pembangunan².

Sebagai suatu dampak pembangunan, baik yang bersifat primer maupun sekunder akan terjadi dampak positif maupun negatif. Dampak positif adalah suatu perubahan lingkungan yang menimbulkan keuntungan, kesejahteraan masyarakat, sedangkan yang negatif adalah perubahan yang menimbulkan kerugian bagi kehidupan manusia.

Selanjutnya, dampak primer mencakup atau meliputi dampak terhadap pola produksi, tingkat pendapatan, penguasaan alat produksi, penguasaan lahan, tenaga kerja, teknologi, modal kegiatan perekonomian masyarakat, sarana dan parasarana transportasi, pola konsumsi barang dan jasa, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Dampak sekunder diartikan sebagai dampak pembangunan terhadap sistem sosial masyarakat sebagai akibat lanjut dari adanya dampak primer. Dampak sekunder meliputi dampak terhadap organisasi tradisional, kelompok tani, lembaga pendidikan, lembaga reboisasi, kerja bakti dsb.

Untuk mengetahui apakah suatu proyek pembangunan mempunyai dampak, maka harus diadakan evaluasi, karena itu Casley (1991: 45)

²Murtola 1996. *Dampak Pembangunan Ekonomi Pasar Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Yogyakarta*, Jakarta : Depdikbud. Th. 1985, h. 4.

menerangkan bahwa dalam rangka mengevaluasi pembangunan dari suatu proyek utama, proyek pertanian maka ada tiga tahap evaluasi yaitu evaluasi dampak pembangunan, evaluasi pertengahan dilihat untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan yang terjadi, dan evaluasi akhir dilakukan untuk menilai sejauhmana pencapaian sasaran dan pengaruhnya secara langsung terhadap kehidupan masyarakat, kemudian jenis evaluasi pasca evaluasi, hal ini dimaksudkan untuk menilai dampak dari proyek tersebut yang meliputi peran serta masyarakat dalam pembangunan, pendapatan dan standar hidup, konsumsi gizi keluarga, status dan peran wanita, kondisi lingkungan hidup. Oleh karena itu, yang menjadi indikator penilaian dampak pembangunan meliputi hal :

- a. Meliputi pendapatan keluarga.
- b. Kondisi mutu perumahan yang cukup luas, jenis konstruksi, jumlah kamar, fasilitas air minum.
- c. Berat bayi waktu lahir, dan tingkat mortalitas anak baru lahir.
- d. Jumlah organisasi masyarakat yang baru dibentuk.
- e. Fasilitas masyarakat dalam organisasi yang ada.
- f. Peran serta kaum wanita dalam menunjang pendapatan keluarga yang meliputi, tidak bekerja, punya pekerjaan tetap, bekerja sambilan dan wanita pengasuh.
- g. Faktor kerusakan lingkungan hidup.

Dari ilustrasi tersebut di atas, aktifitas pembangunan akan berdampak pada kondisi sosila ekonomi masyarakat meliputi:

1. Stratifikasi sosial

Bila kegiatan pembangunan dilaksanakan dalam suatu komunitas, cepat atau lambat akan berdampak pada perubahan stratifikasi sosial masyarakat itu sendiri sebagai suatu elemen sosial yang inheren dalam masyarakat.

Dalam mencermati kondisi sosial, khususnya di daerah pedesaan, maka ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan Marxis Stratifikasi sosial ditentukan oleh faktor kepemilikan dan non kepemilikan dalam proses produksi (dalam hal ini modal), sehingga stratifikasi sosial dipahami sebagai kelompok sosial yang diorganisasikan oleh bentuk-bentuk kepemilikan modal. Ini berarti orang yang memiliki modal memiliki stratifikasi sosial “Atas” dan yang tidak memiliki modal berada pada stratifikasi sosial bawah³.

³Sauderson K. Stephen, 1995. *Sosiologi Makro, Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Th. 1995, h. 267

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat adalah sejauh mana mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dari ukuran tersebut diketahui bahwa apakah masyarakat tertentu berada di bawah atau di atas garis kemiskinan. Tingkat kesejahteraan masyarakat sejauhmana dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar itu dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok.

- (a) kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau keluarga misalnya, sandang, pangan dan papan,
- (b) kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan umum dan memperbaiki kemampuan individu, untuk memproduksi dalam memenuhi kesejahteraan, misalnya, kesehatan, pendidikan, transportasi, komunikasi, lembaga politik dan lain-lain,
- (c) kebutuhan untuk memperbaiki jalur kehidupan demi peningkatan kesejahteraan seperti sumberdaya, modal, kesempatan kerja dan pendapatan, dan
- (d) kebutuhan untuk memperoleh rasa aman dan kebebasan untuk mengambil keputusan, seperti hak asasi manusia, partisipasi politik dan aturan hukum.

Selain kebutuhan primer berupa sandang, pangan dan papan, manusia juga memerlukan kebutuhan lain yang dikenal dengan kebutuhan sekunder, seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan, upacara adat dan hiburan.

Karakteristik Masyarakat Nelayan

Masyarakat nelayan pada umumnya tinggal di daerah pesisir, sedangkan masyarakat pesisir adalah kelompok manusia yang hidup, bekerjasama disuatu daerah tertentu yang disebut pantai. Selain itu masyarakat nelayan menjadikan laut sebagai tempat mata pencaharian pokok sebagai penangkap ikan atau hasil laut lainnya disebut nelayan.

Masyarakat nelayan dibedakan dalam dua kelompok besar yang menghasilkan ikan, yaitu masyarakat yang membudidayakan ikan, kedua masyarakat yang langsung menangkap ikan. Namun kedua kelompok ini sama-sama menghasilkan ikan, tetapi pola kerja berbeda. Menurut Pollanc, sebagaimana yang dikutip oleh Cernea bahwa pola kerja budidaya ikan lebih menyerupai pertanian atau peternakan, sehingga system kerjanya lebih kompleks. Karena itu ia harus selalu dikontrol, pengaturan air mesti baik, pengelolaannya mengetahui dimana ikan,

kapan ikan dipanen, hasilnya kurang lebih dapat diperkirakan⁴. Kemudian penangkap ikan di laut, itu tergolong liar “bebas” dan berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, sesuai dengan kehendak dan kemampuannya masing-masing.

Kebijakan Pembangunan Masyarakat Pantai dan Nelayan

Pada hakikatnya masyarakat pedalaman yang tinggal di pesisir pantai merupakan salah satu tulang punggung pembangunan nasional, dan bahkan di pedesaan mempunyai aset yang besar, mempunyai potensi ekonomi yang banyak, baik dari segi penawaran produksi, terutama tenaga kerja, maupun permintaan akan hasil di luar sektor perikanan atau pertanian⁵.

Namun demikian, walau ia mempunyai potensi yang sangat besar bukan berarti rakyat dan masyarakatnya sudah mencapai taraf kemakmuran dan kesejahteraan seperti diinginkan. Kondisi realistic ini memaksa para pengambil kebijakan untuk mengambil langkah strategis yang lebih progresif dan dinamis dalam mempercepat proses pembebasan masyarakat pedesaan atau nelayan dari kungkungan, belenggu kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan.

Pemerintah dalam pembangunan masyarakat pantai atau nelayan tidak pernah bersikap diam, berbagai upaya dan kebijaksanaan telah ditempuh dengan sungguh-sungguh hal itu dapat dilihat pada gerakan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti:

1. Gerakan Pembangunan Perikanan

Gerakan pembangunan perikanan ini dilaksanakan dengan prinsip terfokus terpadu dan berkelanjutan dengan kegiatan antara lain:

- a. Pengembangan komoditas melalui bantuan pengadaan paket teknologi dan jika perlu paket batuan sarana produksi.
- b. Pembangunan sumber daya manusia termasuk petani nelayan dan aparaturnya.

⁴Cernea. 1988. *Mengutamakan Manusia dalam Pembangunan, Variabel-variabel Sosiologi*, Jakarta : UI Press, 1998, h. 24.

⁵Katjono, Tri Alex. *Bumi Wahana Strategis Menuju Kehidupan Yang Berkelanjutan*. Jakarta : Gramedia, 1984, h. 26.

- c. Peningkatan aksesibilitas terhadap teknologi, modal dan kelembagaan penunjang lainnya.
- d. Peningkatan kelembagaan agrobisnis termasuk pasca panen dan pemasaran.
- e. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang.
- f. Pertumbuhan dan pengembangan kelembagaan kelompok usaha bersama melalui koperasi dan kemitraan dengan pihak swasta.

2. Usaha Bantuan Langsung dan Penyuluhan

a. Bantuan Pembinaan dan Penyuluhan

Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan perikanan laut melalui proyek-proyek APBN dan APBD telah dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan hukum.

Ujung tombak bagi pembinaan dan penyuluhan adalah PPL yang berada di Daerah TK II (Kota) untuk meningkatkan kualitas. Para nelayan harus dibekali ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penangkapan ikan. Bagi nelayan, upaya peningkatan kualitas terus dilakukan melalui pelatihan penangkapan ikan, latihan juru mudi, magang pada beberapa perusahaan. Kebijakan pemerintah terhadap upaya peningkatan kemampuan masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir pantai terutama dalam meningkatkan produktivitas nelayan tertuang dalam beberapa peraturan atau regulasi yaitu:

1. Peraturan pemerintah RI No. 15 1990 tentang usaha perikanan.
2. Petunjuk operasional (PO) proyek peningkatan produksi perikanan dari Direktur Jenderal Perikanan tanggal 17 Maret 1993.

Dengan pandangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan masyarakat nelayan kita harus langsung menyentuh akar permasalahannya dengan tetap memperhatikan kondisi dan karakternya, karena itu ia harus bersifat praktis, masyarakat diberitahukan tentang cara yang benar dan dekat dengan pengalamannya serta pengertian mereka tentang sesuatu hal.

Meskipun sudah ditempuh berbagai macam kebijakan dan berbagai bantuan yang disumbangkan pemerintah, namun kondisi sosial-ekonomi masyarakat nelayan tetap tidak mengalami perubahan dan kemajuan yang berarti. Kondisi ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal dari nelayan itu sendiri yang meliputi :

a. Rendahnya tingkat pendidikan

Pendidikan merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Dalam banyak kenyataan pendidikan mampu meningkatkan taraf hidup seseorang. Titik singgung antara pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi ialah produktivitas kerja, dengan suatu asumsi, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi produktivitas kerja dan berpengaruh pada pendapatan serta pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat.

Kerangka pemikiran tersebut mendasarkan diri pada teori “Human Capital”, teori ini menjelaskan bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, karena pendidikan berperan dalam meningkatkan produktivitas perorangan. Jadi setiap orang memiliki penghasilan yang lebih tinggi karena ditunjang oleh pendidikan yang baik (tinggi), maka dengan pendidikan yang baik pendapatan masyarakat dapat ditingkatkan.

b. Penguasaan Perahu dan Alat Tangkap.

Bagi masyarakat nelayan, perahu atau alat tangkap ikan merupakan suatu indikator produksi dan pendapatan mereka, kedudukan dan keberadaannya sama dengan tanah pada masyarakat petani. Semakin kompleks dan banyak alat produksi yang dikuasai, maka semakin tinggi tingkat produksi dan pendapatan yang akan diperoleh, sekaligus menjadi indikator pelapisan sosial di kalangan masyarakat nelayan.

Dalam kenyataannya, punggawa adalah pemilik sepenuhnya dari perahu dan peralatan tangkap yang digunakan dalam kelompok nelayan modern, mereka yang memiliki perahu (motor, layar, dayung) *purse-saine* sedangkan sawi hanya mengandalkan, menyumbangkan tenaganya dalam kegiatan produksi sehingga ia mendapatkan bagian yang kecil. Sawi ada yang memiliki peralatan, tetapi itu, berupa pancing yang dipakai pada saat perahu tidak beroperasi.

Kesederhanaan pemilik dan penggunaan alat tangkap ikan oleh nelayan ini merupakan kendala dalam meningkatkan kesejahteraan mereka, khususnya bilamana berhadapan dengan nelayan besar yang mempunyai alat tangkap dan perakitan yang lebih canggih dan modern⁶.

c. Sistem Bagi Hasil

Kemiskinan pada masyarakat nelayan cenderung lebih struktur dari masyarakat lainnya. Kondisi struktur ini dicirikan oleh ketidakmampuan

⁶Mubyarto. *Nelayan dan Kemiskinan, Studi Ekonomi Antropologi Dua Desa Pantai*. Jakarta : Rajawali, 1988, h. 37.

nelayan untuk meraih peluang sosial-ekonomi yang ada di masyarakat secara lebih baik di mana mereka hidup berkelompok.

Sistem pembagian hasil merupakan salah satu elemen struktur masyarakat, yang menekan masyarakat nelayan. System bagi hasil yang ada, baik di bidang perikanan lebih banyak merugikan pihak pekerja yang tidak memiliki modal atau alat penangkap ikan, selain itu ia cenderung mengikat buru “sawi” secara turun temurun. Dengan berbagai macam pembagian yang diterapkan oleh punggawa seperti, bagian alat, bagian biaya produksi (operasional), bagian pemilik perahu, bagian untuk mesin, bagian untuk lampu dan sebagainya⁷.

d. Pasar

Persoalan pasar merupakan salah satu elemen yang sangat mendasar dalam hal produksi bagi masyarakat nelayan. Faktor pemasaran sangat penting keberadaannya, mengingat daya tahan ikan hasil tangkapan nelayan sebagai barang dagangan yang “hidup”. Ikan biasanya tidak bisa disimpan lama sebagaimana barang dagangan lainnya. Kondisi ikan mirip dengan kondisi buah, ikan rentang daya tahannya, begitu pendek dan bila tidak segera dijual, maka ikan akan menjadi busuk dan karenanya harga ikan akan turun secara drastis. Kondisi pasar yang berbentuk “oliposoni” dimana jumlah penjual lebih banyak dari pada jumlah pembeli. Posisi pedagang ikan pada umumnya jauh di atas angin, karenanya mampu mempermainkan harga yang menguntungkan dirinya sendiri.

Kerangka Pemikiran

Pembangunan merupakan salah satu aktivitas kemanusiaan, serta memuat proses perubahan secara bertahap dan berkesinambungan. Ini berarti ada dinamisasi dalam penerapannya, tetapi bukan berarti tanpa arah dan tujuan yang jelas, oleh sebab itu kegiatan pembangunan harus membawa perubahan yang positif bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat dimana pembangunan itu dilaksanakan.

Pembangunan sebagai kegiatan untuk mengubah kondisi yang lebih baik yang menyangkut sikap, pola pikir, perilaku dari kehidupan sosial ekonomi suatu masyarakat melalui reformasi, rekonstruksi tatanan sosial

⁷Abustam, M. Idrus, 1994, *Kajian Tindak Dalam Upaya Pengembangan Sumber Daya Manusia Miskin di Daerah Pedesaan*, Ujungpandang : FIP IKIP Ujungpandang, 1994, h. 10.

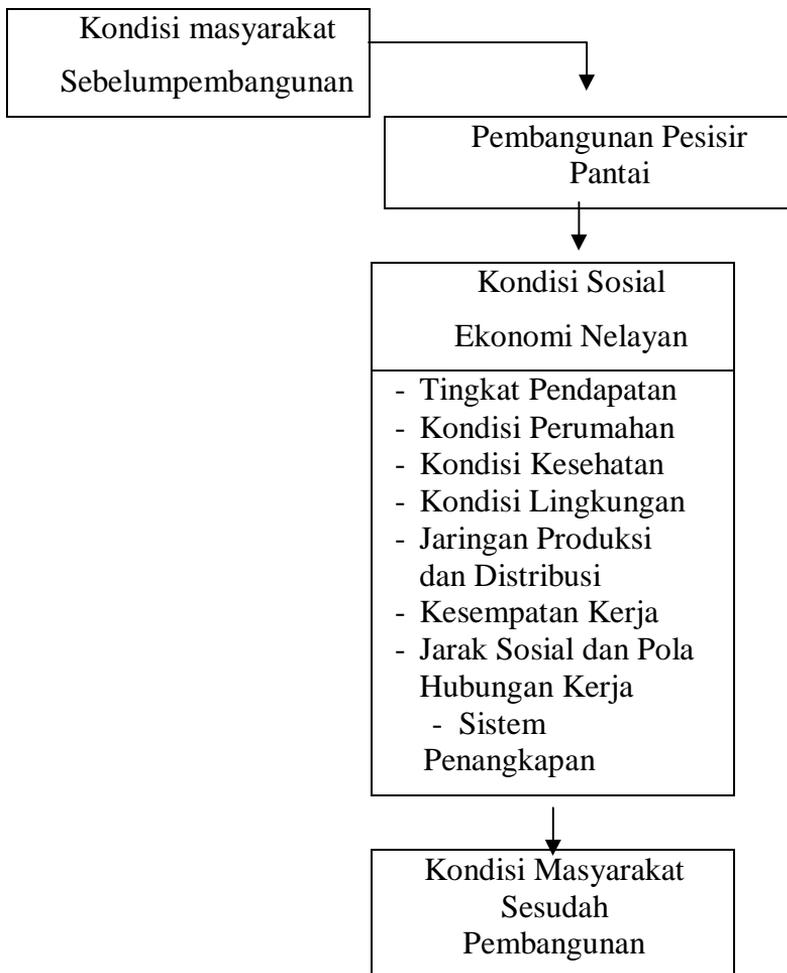
atau dengan kata lain pembangunan adalah perubahan dari tradisional ke arah kemajuan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka dengan melalui pembangunan yang sedang digalakkan, masyarakat akan mengalami kemajuan dan mampu memberdayakan diri untuk senantiasa bergerak lebih dinamis dan keluar dari segala keadaan yang bersifat tradisional dan terbelakang, maka dalam kondisi seperti ini masyarakat akan mengalami perubahan sosial yang meliputi, stratifikasi sosial akan bergeser, organisasi sosial akan berubah, kesempatan kerja akan tercipta, yang pada akhirnya akan menimbulkan jarak sosial dan pola hubungan kerja yang efisien.

Pelaksanaan program pembangunan masyarakat di pesisir pantai, memang diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang kondisi sosial-ekonominya masih dalam keadaan relatif rendah dan sulit untuk memenuhi syarat kelayakan dan kesejahteraan hidup. Suatu kegiatan pembangunan yang berdampak positif ialah yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat atau memajukan masyarakat yang meliputi tingkat pendapatan meningkat, derajat kesehatan semakin membaik, lingkungan hidup lebih bersih, kondisi perumahan sudah layak huni dan sebagainya.

Dengan terpenuhinya variabel sosial-ekonomi tersebut, maka masyarakat akan mengalami kestabilan hidup dan merasa aman sehingga sasaran dan tujuan dari suatu aktivitas pembangunan dapat tercapai yaitu kesejahteraan masyarakat.

Bagan kerangka pemikiran yang dibangun adalah:



Hipotesis

1. Pembangunan pesisir pantai berdampak pada perubahan sosial-ekonomi masyarakat nelayan
2. Hambatan yang dialami nelayan dalam meningkatkan kondisi sosial-ekonominya yaitu tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya alat produksi, system pembagian hasil, faktor pemasaran/harga ikan.

Penelitian ini adalah survey yang dilakukan pada masyarakat nelayan. Untuk melihat dampak pembangunan pesisir pantai terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat serta perubahan yang terjadi di dalamnya.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Abeli Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dengan pertimbangan, bahwa lokasi ini merupakan kawasan pantai yang masyarakatnya dominan berpencaharian nelayan. Selain itu masyarakat nelayan di daerah ini kerap menerima bantuan pemberdayaan masyarakat nelayan. Masyarakat nelayan di wilayah ini memiliki kelengkapan infrastruktur yang mendukung produktifitas mereka.

Kesimpulan Dan Implikasi Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan pesisir pantai berdampak pada terjadinya perubahan sosial-ekonomi masyarakat nelayan yang meliputi stratifikasi sosial nelayan, organisasi nelayan, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, jarak sosial dan pola hubungan kerja, sistem penangkapan ikan, begitu pula halnya dengan kondisi rumah tangga nelayan cenderung semakin membaik tingkat pendapatan yang meningkat. Kondisi perumahan, kesehatan, dan lingkungan mengalami perbaikan, peningkatan bila dibandingkan dengan sebelum adanya pembangunan pesisir pantai.

Kesimpulan

1. Kegiatan pembangunan pesisir pantai berdampak pada perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan yang meliputi :
 - a. Pembangunan pesisir pantai mendorong terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat nelayan punggawa-sawi yang pada umumnya berada di atas kategori tinggi.
 - b. Seiring dengan membaiknya pendapatan nelayan akibat adanya pembangunan di pesisir, ternyata mendorong terjadinya perubahan. Kondisi perumahan nelayan yang pada umumnya rumah permanen.
 - c. Dengan adanya pembangunan fasilitas kesehatan berupa Puskesmas di lokasi ini, berdampak pada semakin membaiknya kondisi kesehatan masyarakat.
 - d. Kondisi lingkungan nelayan setelah adanya pembangunan di pesisir ini semakin membaik, ia tidak membuang lagi kotoran di sembarang tempat, Membaiknya kondisi ini akibat adanya perhatian pemerintah yang cukup besar terhadap lokasi ini.
 - e. Kegiatan pembangunan di daerah pedesaan pesisir pantai membawa perubahan pada kehidupan sosial ekonomi nelayan; di mana punggawa darat menguasai alat-alat produksi dalam sektor perikanan sekaligus menempati posisi sosial yang terhormat. Meskipun jumlahnya cenderung berkurang. Lain halnya dengan punggawa darat, berkat adanya pembangunan jumlahnya justru mengalami peningkatan, ini berarti banyak sawi yang meningkat

strata keposisi punggawa laut dan tentunya pendapatan dan kehidupan mereka semakin baik. Selanjutnya sawi semakin menggantungkan diri pada punggawa darat, hal ini disebabkan banyak nelayan pancing (tradisional) beralih masuk bergabung keikatan punggawa sawi.

- f. Aktivitas pembangunan di daerah pesisir pantai yang diiringi dengan motivasi perikanan yang berskala besar membawa perubahan pada sistem jaringan produksi dan distribusi nelayan..
 - g. Dengan adanya pembangunan di pesisir pantai membuka peluang terjadinya usaha lain di luar sektor perikanan. Namun kenyataannya, ini belum banyak dimanfaatkan oleh nelayan khususnya para sawi.
 - h. Terjadinya perbedaan dalam penguasaan alat produksi, tingkat pendapatan dan fungsi yang diembangnya antara strata yang satu dengan yang lainnya telah menimbulkan perbedaan sosial.
 - i. Sebelum adanya pembangunan di pesisir ini sistem penangkapan nelayan masih sederhana (tradisional) dengan kapal yang berkala kecil, serta banyak nelayan mengandalkan pancing sebagai alat utama menangkap ikan; namun setelah adanya pembangunan tersebut maka terjadilah proses modernisasi yang juga berakibat terjadinya perubahan sistem penangkapan, dimana nelayan pada umumnya tinggal di laut dalam waktu yang relatif lama (1-3 bulan) baru kembali ke darat; dengan adanya motorisasi ini banyak nelayan tradisional yang bergabung dengan kelompok punggawa sawi ini.
2. Hambatan nelayan dalam memperbaiki taraf ekonominya adalah :
- a. Tingkat pendidikan dan pelatihan yang rendah.
 - b. Kurangnya alat produksi.
 - c. Sistem bagi hasil; merupakan salah satu hambatan yang membuat nelayan sawi mengalami kesulitan dalam meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonominya.
 - d. Faktor pemasaran dan harga ikan, faktor pemasaran di lokasi ini relatif dapat teratasi dengan baiknya jalur transportasi, banyaknya usaha pengeringan ikan, dan dimanfaatkannya ikan kecil sebagai pakan udang.

Implikasi Penelitian

1. Pemerintah perlu memperhatikan dan mengatur serta memperbaiki hubungan kerja antara punggawa darat, punggawa laut dan sawi agar tidak terjadi kesenjangan sosial ekonomi yang jauh, misalnya

memperbaiki sistem bagi hasil, sistem distribusi, sistem pemasaran sehingga tidak terjadi sikap monopoli oleh sekelompok orang.

2. Para LSM perlu membina keluarga nelayan agar dapat mengelola ikan dalam bentuk kemasan sehingga dapat menambah pendapatan mereka.
3. Pemerintah perlu mengadakan pelatihan pada masyarakat nelayan agar memiliki keterampilan dan teknologi perikanan yang dapat meningkatkan produksi mereka serta memberikan modal khususnya kepada para sawi agar tidak terlalu menggantungkan diri kepada punggawa darat.

Daftar Pustaka

- Abustam, M. Idrus, 1991, *Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Pedesaan di Sulawesi Selatan*, Ujungpandang : The Toyota Pondation, Tokyo.
- , 1994, *Kajian Tindak Dalam Upaya Pengembangan Sumber Daya Manusia Miskin di Daerah Pedesaan*, Ujungpandang : FIP IKIP Ujungpandang.
- A'syari, Fuad,. 1995, *Dasar-Dasar Metode Perencanaan Lingkungan dalam Pembangunan Nasional*, Surabaya : Wedy Media.
- Cernea. 1988. *Mengutamakan Manusia dalam Pembangunan, Variabel-variabel Sosiologi*, Jakarta : UI Press
- Efendi Sofyan dan Singarimbun Masri, 1989, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta LP3S.
- Hamid, Abu. 1985. *Studi Tinjauan Sosio Antropologis Ekonomi Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Sektor Kemaritiman di Sulawesi Selatan*, UNHAS Ujungpandang.
- Handoyo. A. 1985, *Dampak Kegiatan Ekonomi Rakyat Dalam Murtola 1996. Dampak pembangunan Ekonomi Pasar Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Yogyakarta*, Jakarta : Depdikbud.
- Hans, Dieter Ever. 1987. *Kebutuhan Pokok dan Pembangunan (Ringkasan Ceramah)*, Jakarta: Pusat Latihan Penelitian Ilmu sosial.
- , dan Sumardi Miliyato. 1985. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, Jakarta : Rajawali Press.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : Cides.
- Katjono, Tri Alex. 1993. *Bumi Wahana Strategis Menuju Kehidupan Yang Berkelanjutan*. Jakarta : Gramediaq.
- Korten, DC. Dan Syahrir. 1988. *Pembangunan yang Berdimensi Kerakyatan, Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : Cides.
- Kumar, DJ. Caley. 1991. *Pemantauan dan Evaluasi Proyek Pertanian*. Jakarta : UI. Press.

- Manheim. Karl. 1985. *Sosiologi Sistematis, Suatu Studi Tentang Masyarakat*. Jakarta : Bina Aksara
- Moleong, J. Lezy, 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosdakarya.
- Mubyarto, 1988. *Nelayan dan Kemiskinan, Studi Ekonomi Antropologi Dua Desa Pantai*. Jakarta : Rajawali.
- , 1988, *Studi Pengembangan Desa Pantai di Propinsi Riau*, Yogyakarta : Tim P3PK. UGM.
- Mukhlis. 1988, *Dimensi Sosial Kawasan Pantai*. P3MP. UNHAS; Ujungpandang.
- Murtola SA. Dkk. 1986. *Dampak Pembangunan Ekonomi Pasar Terhadap Pantai Salak Pondok Desa Bangunkerto*.
- Mustodidjaja AR. 1996. *Meningkatkan Partisipasi Daya Saing dan Kemitraan, Dinamika dan Tantangan Manajemen Pembangunan*. Jakarta: Prisma.
- , 1996. *Beberapa Dimensi Paradigma dan Model Pembangunan Abad 21*, Ujungpandang.
- Rahman, 1992. *Analisis Hubungan Kegiatan Masyarakat Nelayan dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak di Kecamatan Barru, (Tesis) UNHAS: Ujungpandang*.
- Rama Bahaking, 1992. *Persepsi Masyarakat Nelayan Terhadap Pemukiman Sehat (Kasus di Cambaya Kecamatan Ujungtanah Kodya Ujungpandang)*.
- Robert H. Laurer, 1993, *Persepsi Tentang Perubahan sosial*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sauderson K. Stephen, 1995. *Sosiologi Makro, Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siagian. 1995. *Pembangunan Infrastruktur Pedesaan*, dalam Lukman Soetrisno, Para Umayu, 1995. *Liberisasi Ekonomi Pemerataan Kemiskinan*, Jakarta: Tiara Wacana.
- Sumodingrat, Gunawan. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Jakarta: Tiara Wacana.
- Tjokrowinoto, 1996, *Politik Pembangunan, Sebuah Analisis Konsep Arah dan Strategis*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Wei Kiang The, 1989. *Pembangunan dan Pemerataan, Beberapa Pendekatan Alternatif*. Jakarta: LP3S.